

**LAPORAN PERENCANAAN WILAYAH
ACARA II
ANALISIS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas Perencanaan Wilayah
Dosen pengampu : Rita Noviani, S.Si, M.Sc**



**Disusun Oleh :
Bhian Rangga JR
K 5410012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013**

ACARA II

ANALISIS KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. TUJUAN

1. Mengukur indeks kualitas hidup di suatu wilayah
2. Menganalisa keterkaitan dan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkan dari hasil perhitungan terhadap pembangunan wilayah
3. Mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antar masyarakat dengan menggunakan koefisien Gini

II. DATA YANG DIPERLUKAN

1. Angka kematian bayi
2. Angka harapan hidup
3. Angka melek huruf
4. Jumlah pendapatan
5. Jumlah rumah tangga
6. Persentase penduduk miskin
7. Persentase balita kurang gizi
8. Angka partisipasi murni (APM) SMP

III. CARA KERJA

1. Membuka sheet baru pada program excel
2. Melakukan input data yang telah tersedia ke dalam tabel
3. Menghitung dependency ratio
4. Menghitung TPAK
5. Menghitung TPT
6. Menghitung indeks Gini
7. Menghitung persentase penduduk miskin
8. Menghitung APM
9. Menghitung IKH

IV. DASAR TEORI

Penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indikator tersebut :

1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri, dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

4. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Quality of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat

dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkul dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Pengertian lainnya Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Menurut SMERU dalam Suharto, dkk (2004), adalah Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk

memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Menurut Depsos (2001), Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Friedman dalam Mudrajat Kuncoro (1997), Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi:

- a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan),
- b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit),
- c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial),
- d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa,
- e) pengetahuan dan keterampilan, dan
- f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Shrarp, et.al (1996) dalam Mudrajad Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse dalam Kuncoro (2000), yang mengatakan: “a poor country is poor because it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu.

Rumus dalam penghitungan garis kemiskinan (Menurut BPS) ialah :

$$\mathbf{GK = GKM + GKBM}$$

Keterangan :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKBM = Garis Kemiskinan Bukan Makanan

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Konsep Kemiskinan

Ada tiga macam konsep kemiskinan (Sunyoto Usman, 2004), yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkrit (a fixed yardstick). Masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan.

Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan “the idea of relative standard”, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (in terms of judgement) anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep ini juga dikritik, terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan ternyata beragam dan terus berubah-ubah. Layak bagi komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lain, demikian juga layak pada saat sekarang boleh jadi tidak untuk mendatang.

Sedangkan kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixed yardstick, dan tidak memperhitungkan the idea of relatives standard. Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin atau sebaliknya. Dan kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap seperti itu. Oleh karenanya, konsep ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya.

Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu; distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi.

Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Menurut Irma

Adelma dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (Capital Incentive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi Negara Sedang Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

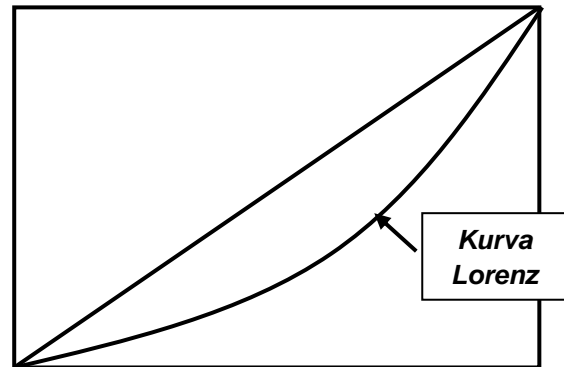
Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang

semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. (Lincoln Arsyad,1997)

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi komulatif pendapatan nasional diberbagai lapisan penduduk. Sumbu vertical menunjukkan presentase komulatif pendapatan nasional & Sumbu horizontal menunjukkan persentase komulatif penduduk.

- a. Semakin dekat dg diagonal, semakin merata pendapatan
- b. Semakin jauh dg diagonal semakin tidak merata pendapatan



Indeks atau Rasio Gini

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratio dikemukakan oleh C.GINI yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

$$GC = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

Atau

$$GC = 1 - \sum F_i (Y_i + Y_{i-1})$$

Keterangan :

GC = Gini Ratio

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

k = Banyaknya kelas pendapatan

menurut BPS, indeks gini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_1 - 1)}{10.000}$$

Keterangan:

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke- i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke- i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Rentang Indeks Gini

0 = merata

1 = timpang

0,2 – 0,35 = relatif sama

0,5 – 0,70 = timpang

Sedangkan menurut Oshima, rentang Indeks Gini adalah:

< 0,3 = rendah

0,3 – 0,4 = sedang

>0,4 = tinggi

Nilai/Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. Namun dalam studi empiris terutama dalam single country, ternyata kemiskinan tidak identik dengan kesejahteraan. Artinya ukuran di atas belum mencerminkan tingkat kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Ranis (1977) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di Republik Cina dan Ravallion dan Datt (1996) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di India, menunjukkan kedua negara tersebut dilihat dari tingkat pendapatan per kapita maupun ukuran Gini (Gini ratio) menunjukkan tingkat kemiskinan yang cukup parah. Namun dilihat dari tingkat kesejahteraan, kedua negara tersebut masih lebih baik dari beberapa negara Amerika Latin yang mempunyai tingkat Gini ratio rendah dan tingkat pendapatan perkapita tinggi.

Ranis, Ravallion dan Datt memasukan faktor seperti tingkat kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, hak mendapatkan informasi, layanan kesehatan yang mudah dan murah, perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dan lain-lain. Intinya adalah dalam mengukur kemiskinan, banyak variabel non keuangan yang harus diperhatikan. Variabel keuangan (tingkat pendapatan) bukanlah satu satunya variabel yang harus dipakai dalam menghitung kemiskinan. Namun kalau pengambil keputusan, lebih menitikberatkan pada cross variable study dalam mengatasi masalah kemiskinan, berarti kemiskinan akan diatasi dengan cara meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang luas.

Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di Negara Sedang Berkembang. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Lincoln Arsyad (1997), cara yang sangat sederhana untuk mendekati masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi.

Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

Indeks Kualitas Hidup (IKH) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi, tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus tetapi tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan social. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada: (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan menggambarkan status gizi ibu dan anak, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

$$IKH = \frac{1}{3} \left(\frac{229-IMR}{2.22} \right) + \left(\frac{LE - 38}{0.39} \right) + LR$$

IKH tinggi, > 75

IKH sedang, 50-75

IKH rendah, < 0

Semakin tinggi IKH semakin baik

Selain IKH, juga terdapat indikator lain yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia. Indikator tersebut adalah Millennium Development Goals adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan-tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Millenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintah dan kepala negara pada saat konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millineium di New York pada bulan September 2000. Secara

Ringkas fokus pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs meliputi 8 tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan berat
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang
3. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan maternal
6. Melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkolosa)
7. Menjamin keberlangsungan lingkungan

MDGs bukan hanya merupakan pemenuhan komitmen internasional tetapi merupakan penajaman upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, MDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Membuka dan menjalankan program excel

Pada acara 2 perencanaan wilayah berkaitan dengan analisis kesejahteraan sosial. Untuk memudahkan perhitungan dan analisis data maka digunakan program microsoft excel.

2. Menginput data yang tersedia ke dalam tabel

Adapun data – data yang akan diinput berkaitan dengan analisis kesejahteraan sosial di Kabupaten Boyolali antara lain banyaknya rumah tangga, data penduduk usia 5 tahun dan usia 10 tahun keatas menurut lapangan kerja , data jumlah pendapatan, data jumlah penduduk tahun 2010

setiap kecamatan, serta data – data kependudukan di Kabupaten Boyolali. Adapun sumber data berasal dari Boyolali Dalam Angka 2010 Badan Pusat Statistik Boyolali.

3. Menghitung Dependency Ratio

Dependency ratio dapat diperoleh dengan rumus

$$DR = \frac{\text{penduduk tidak produktif}}{\text{penduduk produktif}} * 100$$

Misalnya.

Kecamatan Selo memiliki penduduk produktif (penduduk yang berumur 15-64 tahun) sebesar 8857 dan memiliki penduduk non produktif (penduduk yang berumur < 15 tahun) sebesar 17077. Maka Dependency ratio Kecamatan Selo sebesar

$$\begin{aligned} DR &= \frac{17077}{8857} \times 100 \% \\ &= 51,8651 \end{aligned}$$

Berikut merupakan tabel Dependency Ratio di Kabupaten Boyolali tahun 2010. Perhitungan dengan menggunakan aplikasi excel untuk memudahkan perhitungan

Tabel 1. Dependency ratio Kabupaten Boyolali Tahun 2010

Sumber : data BPS dan pengolahan data dengan excel

No	Kecamatan	Penduduk Non Produktif	Penduduk Produktif	DR (%)
1	Selo	8857	17077	51,8651
2	Ampel	23162	45803	50,5687
3	Cepogo	18143	35137	51,635
4	Musuk	20778	39929	52,0374
5	Boyolali	20085	40556	49,5241
6	Mojosongo	17807	33652	52,9151
7	Teras	15758	30193	52,1909
8	Sawit	10936	20727	52,7621
9	Banyudono	14820	30258	48,9788
10	Sambi	17985	30672	58,6365
11	Ngemplak	23609	47602	49,5967
12	Nogosari	20582	40206	51,1914
13	Simo	15861	27806	57,0416

14	Karanggede	14769	25723	57,4155
15	Klego	18006	28017	64,2681
16	Andong	22474	39378	57,0725
17	Kemususu	17668	28732	61,4924
18	Wonosegoro	19770	34013	58,1248
19	Juwangi	12310	22553	54,5825
			Rata2 DR	54, 2921

4. Menghitung TPAK (Tingkat Partisipasi angkatan Kerja)

$$\text{TPAK} = \frac{\text{penduduk angkatan kerja}}{\text{penduduk usia kerja}} \times 100$$

Misalnya.

Kecamatan Selo memiliki angkatan kerja sebesar 18074. Penduduk usia kerja 22640. Maka TPAK kecamatan Selo adalah=

$$\begin{aligned} \text{TPAK kec Selo} &= \frac{\text{penduduk angkatan kerja}}{\text{penduduk usia kerja}} \times 100 \\ &= \frac{18074}{22640} \times 100 \\ &= 79,83216 \% \end{aligned}$$

Berikut merupakan tabel TPAK di Kabupaten Boyolali tahun 2010. Perhitungan dengan menggunakan aplikasi excel untuk memudahkan perhitungan

Tabel 2. TPAK di Kecamatan Boyolali tahun 2010

No	Kecamatan	Angkatan Kerja	Usia kerja	TPAK (%)
1	Selo	18074	22640	79,83216
2	Ampel	46306	58004	79,83243
3	Cepogo	35.751	44779	79,83876
4	Musuk	40.621	50881	79,8353
5	Boyolali	39.997	50099	79,83592
6	Mojosongo	34.558	43286	79,83644
7	Teras	30.717	38472	79,84248
8	Sawit	22.214	27822	79,84329
9	Banyudono	30.431	38119	79,83158
10	Sambi	32.704	40965	79,834
11	Ngemplak	47.706	59753	79,83867
12	Nogosari	40.749	51044	79,83113

13	Simo	29.379	36802	79,8299
14	Karanggede	27.317	34219	79,82992
15	Klego	30.908	38712	79,84088
16	Andong	41.690	52220	79,83531
17	Kemusu	31.177	39051	79,83662
18	Wonosegoro	36.846	46153	79,83446
19	Juwangi	23.600	29560	79,83762

5. Menghitung TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)

$$\text{TPT} = \frac{\text{jumlah pencari kerja} \times 100}{\text{jumlah angkatan kerja}}$$

Untuk menghitung TPT, data yang digunakan adalah data se Kabupaten Boyolali. Untuk menghitung TPT di Kabupaten Boyolali maka dapat dihitung sebagai berikut.

Jumlah pencari kerja di kabupaten Boyolali = 233807. Sedangkan jumlah angkatan kerja 168034. Maka TPT di Kabupaten Boyolali sebesar

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{\text{jumlah pencari kerja} \times 100}{\text{jumlah angkatan kerja}} \\ &= \frac{233807 \times 100}{168034} \\ &= 1,391426735 \% \end{aligned}$$

6. Menghitung Indeks Gini

Untuk menghitung indeks Gini dapat dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Menghitung jumlah rumah tangga, menghitung jumlah penduduk

Adapun untuk menghitung jumlah rumah tangga, menghitung jumlah penduduk, dan perkapita diperoleh dari data kependudukan yang bersumber dari BPS Boyolali.

Tabel 3. Jumlah rumah tangga, jumlah penduduk dan perkapita di Kabupaten Boyolali Tahun 2010

No	Kecamatan	JP	RT	Pendapatan per kapita
1	Selo	26937	7692	801200
2	Ampel	68965	20978	312900

3	Cepogo	53280	14701	405100
4	Musuk	60717	16377	355400
5	Boyolali	59641	17496	361900
6	Mojosongo	51459	14927	419400
7	Teras	45951	12070	469700
8	Sawit	32993	8793	654100
9	Banyudono	45078	13266	478000
10	Sambi	48657	13694	443500
11	Ngemplak	71111	20584	303500
12	Nogosari	60788	17473	355000
13	Simo	43667	13873	494200
14	Karanggede	40492	10960	533000
15	Klego	46023	11958	468900
16	Andong	61852	14962	348900
17	Kemus	46400	10870	465100
18	Wonosegoro	54865	13778	393400
19	Juwangi	34963	7997	617300
Jumlah		953839	262449	

b. Menghitung jumlah pendapatan

Untuk menghitung jumlah pendapatan diperoleh dengan mengkalikan jumlah penduduk dengan pendapatan perkapita

Misalnya kecamatan Selo tahun 2010 memiliki jumlah penduduk 26937. Pendapatan perkapita 801200. Maka jumlah pendapatan di kecamatan Selo adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Pendapatan di kecamatan Selo} &= \text{jumlah penduduk} \times \text{pendapatan perkapita} \\
 &= 26937 \times 801200 \\
 &= 21581924400
 \end{aligned}$$

Berikut merupakan tabel pendapatan di Kabupaten Boyolali tahun 2010. Perhitungan dengan menggunakan aplikasi excel untuk memudahkan perhitungan

Tabel 4. Jumlah pendapatan di Kab. Boyolali tahun 2010

No	Kecamatan	JP	RT	per kapita	Pendapatan
1	Selo	26937	7692	801200	21581924400
2	Ampel	68965	20978	312900	21579148500

3	Cepogo	53280	14701	405100	21583728000
4	Musuk	60717	16377	355400	21578821800
5	Boyolali	59641	17496	361900	21584077900
6	Mojosongo	51459	14927	419400	21581904600
7	Teras	45951	12070	469700	21583184700
8	Sawit	32993	8793	654100	21580721300
9	Banyudono	45078	13266	478000	21547284000
10	Sambi	48657	13694	443500	21579379500
11	Ngemplak	71111	20584	303500	21582188500
12	Nogosari	60788	17473	355000	21579740000
13	Simo	43667	13873	494200	21580231400
14	Karanggede	40492	10960	533000	21582236000
15	Klego	46023	11958	468900	21580184700
16	Andong	61852	14962	348900	21580162800
17	Kemusuh	46400	10870	465100	21580640000
18	Wonosegoro	54865	13778	393400	21583891000
19	Juwangi	34963	7997	617300	21582659900
	Jumlah	953839	262449		

- c. Menghitung x_i , persentase jumlah kumulatif kelas dengan kumulatif terakhir, menghitung Y_i , nilai kumulatif, nilai kumulatif kelas, $(x_{i+1} - x_i)$, $Y_i + (Y_i + 1)$, $(x_{i+1} - x_i) * (Y_i + Y_{i+1})$.

Adapun untuk menghitung persentase jumlah kumulatif kelas dengan cara jumlah penduduk tiap kecamatan dibagi jumlah penduduk di kabupaten

Misalnya. Kecamatan Selo memiliki jumlah penduduk sebesar 26937. Jumlah penduduk Kab Boyolali keseluruhan sebesar 953839. Maka untuk menghitung persentase jumlah kumulatif kelas dengan kumulatif terakhir adalah

$$= 26937 / 953839$$

$$= 0,028240615$$

Adapun untuk menghitung Y_i adalah nilai X_i baris pertama dibagi nilai X_i baris terakhir. Untuk menghitung nilai kumulatif dengan cara penjumlahan dengan nilai dibawah kolomnya). Untuk menghitung kumulatif kelas dengan cara angka terakhir dan terbesar dalam baris kumulatif (dibagi dalam 5 kelas). Kemudian menghitung $(x_{i+1} - x_i)$ dengan cara angka X_i sebelum dikurangi

angka kumulatif sesudahnya. Untuk menghitung $(X_{i+1}-X_i) * (Y_i+Y_{i+1})$ yang merupakan perkalian kolom $(X_{i+1} - X_i)$ dengan kolom $Y_i + (Y_{i+1})$

Dengan demikian indeks gini dengan rumus
$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i+1} - 1)}{10.000}$$

Berikut merupakan tabel perhitungan indeks gini di kabupaten Boyolali Tahun 2010. Perhitungan indeks gini menggunakan aplikasi excel untuk memudah perhitungan

Dengan memperhatikan klasifikasi indeks gini maka Kabupaten Boyolali pada tahun 2010 dengan nilai indeks gini sebesar 0,336653 maka termasuk memiliki indeks gini dalam klasifikasi “ sedang “. Hal ini berarti Moderate inequality (sedang) jika 40 % penduduk pendapatan rendah menerima 12-17 % pendapatan perkapita di daerah tersebut

7. Menghitung persentase penduduk miskin

Tabel 6. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jumlah Keluarga Miskin	Persentase penduduk miskin%
1	Selo	26937	3631	13,4796
2	Ampel	68965	8253	11,96694
3	Cepogo	53280	5094	9,560811
4	Musuk	60717	6254	10,30025
5	Boyolali	59641	3735	6,26247
6	Mojosongo	51459	4391	8,533007
7	Teras	45951	3344	7,277317
8	Sawit	32993	1795	5,440548
9	Banyudono	45078	2979	6,608545
10	Sambi	48657	8157	16,76429
11	Ngemplak	71111	5540	7,790637
12	Nogosari	60788	7499	12,33632
13	Simo	43667	5429	12,43273
14	Karanggede	40492	5140	12,69387
15	Klego	46023	6141	13,34333
16	Andong	61852	8201	13,25907
17	Kemusu	46400	8261	17,80388
18	Wonosegoro	54865	9138	16,65543
19	Juwangi	34963	4344	12,42456
Jumlah		953839	107326	11,252

Sumber : data BPS dan pengolahan dengan aplikasi excel

8. Menghitung IKH (indeks kualitas hidup)

Untuk mengetahui IKH dapat diperoleh data berkaitan dengan IKH antara lain :

1. Angka kematian bayi (IMR) kabupaten Boyolali 164
2. Angka harapan hidup (LE) kabupaten Boyolali 81,3 %
3. Angka melek huruf (LR) kabupaten Boyolali 91,08%
4. Jumlah pendapatan kabupaten boyolali 112.317.684.900
5. Jumlah rumah tangga di kabupaten Boyolali 262.449
6. Persentase penduduk miskin kabupaten Boyolali Tahun 2010 11,252 %
7. Persentase balita kurang gizi di Kabupaten Boyolali tahun 2010 0,7%

Dengan demikian IKH dapat dihitung dengan rumus

$$\begin{aligned} \text{IKH} &= \frac{1}{3} \left(\frac{229 - \text{IMR}}{2,22} \right) + \left(\frac{\text{LE} - 38}{0,39} \right) + 38 \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{229 - 164}{2,22} \right) + \left(\frac{81,3 - 38}{0,39} \right) + 38 \\ &= \frac{1}{3} (29,7) + 111,025 + 38 \\ &= 9,9 + 111,025 + 38 \\ &= 158,925 \end{aligned}$$

Berdasarkan klasifikasi IKH maka IKH Kabupaten Boyolali Tahun 2010 tergolong IKH tinggi (> 75). Dengan demikian semakin tinggi IKH maka semakin baik.

9. Menghitung Angka Partisipasi murni

$$\begin{aligned} \text{APM} &= \text{jumlah murid smp (usia 13-15)} / \text{jumlah usia Smp} * 100 \% \\ &= 26429 // 294783 * 100 \% \\ &= 8,96 \% \end{aligned}$$

B. Pembahasan

Pada acara 2 perencanaan wilayah, berkaitan dengan analisis kesejahteraan sosial diperlukan berbagai data – data yang berkaitan dengan kependudukan. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa DR

terendah berada di Kecamatan banyudono dengan DR sebesar 48,9788 %. Hal ini berarti tiap 100 orang kelompok penduduk produktif harus menanggung 48,9788 kelompok yang tidak produktif. DR tertinggi berada di kecamatan Klego dengan DR sebesar 64,2681. Hal ini berarti bahwa DR di Kecamatan Banyudono tergolong rendah (< 50) sedangkan DR di kecamatan Klego tergolong sedang (antara 61-69). Rata-rata DR di Kabupaten Boyolali sebesar 54,2921. Hal ini berarti rata-rata DR di sejumlah kecamatan tergolong memiliki DR sedang. Apabila suatu wilayah memiliki DR semakin tinggi maka semakin buruk terhadap implikasi DR tersebut.

TPAK di sejumlah kecamatan berkisar 79 %. Hal ini berarti bahwa TPAK di sejumlah kabupaten di Kab. Boyolali tergolong memiliki angka TPAK tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong angkatan kerja. TPT di kabupaten Boyolali tahun 2010 sebesar 1,3914 %. Hal ini mengindikasikan bahwa TPT tersebut rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah maka TPT semakin baik.

Indeks Gini di kabupaten Boyolali tahun 2010 sebesar 0,336653. Hal ini termasuk memiliki indeks gini dalam klasifikasi “sedang”. Dengan demikian berarti moderate inequality karena 40 % penduduk pendapatan rendah menerima 12-17 % pendapatan perkapita di daerah tersebut. Dengan demikian apabila wilayah tersebut memiliki indeks gini dalam kategori “sedang” maka ada hubungan yang selaras antara pendapatan yang diterima oleh keluarga atau individu dengan total pendapatan daerah tersebut. Dengan demikian hampir tingkat pemerataan ekonomi masyarakatnya dalam kategori tingkat pemerataan hampir semua. Namun demikian, adanya nilai indeks gini belum mencerminkan bahwa wilayah tersebut miskin atau kaya. Hal ini disebabkan karena parameter untuk mengetahui wilayah tersebut kaya atau miskin bukan ditinjau dari satu sektor saja melainkan juga memperhatikan aspek tingkat kesejahteraan. Bisa saja suatu wilayah memiliki nilai indeks gini rendah akan tetapi ditinjau dari segi tingkat kesejahteraan berupa pendapatan perkapitanya tinggi. Ditinjau dari persentase jumlah penduduk miskin terlihat bahwa di kabupaten boyolali memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,252 %. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk sejahtera lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin.

Dengan demikian menunjukkan bahwa kabupaten Boyolali memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Penduduk miskin yang terdapat di sejumlah daerah kecamatan merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan yang masih minim. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat berupaya melakukan solusi agar penduduk miskin tersebut dapat sejahtera salah satunya dapat diwujudkan dengan peningkatan layanan fasilitas serta pemberian bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah daerah setempat guna mengurangi angka kemiskinan.

Dengan adanya indeks gini maka akan terlihat tingkat kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Di daerah kabupaten Boyolali dengan indeks gini sebesar 0,33 maka wilayah tersebut tergolong sedang. Dengan demikian kesenjangan antara pendapatan masyarakat satu dengan pendapatan masyarakat pasti tetap ada. Namun demikian salah satu cara untuk meminimalisir kesenjangan pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, misalnya meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Indek kualitas hidup (IKH) di kabupaten Boyolali tahun 2010 sebesar 158, 925. Berdasarkan klasifikasi IKH maka IKH di Kabupaten Boyolali tergolong tinggi. Maka semakin tinggi IKH maka semakin baik. IKH berkaitan erat dengan mutu penduduk yang ada di wilayah tersebut. Dengan adanya peningkatan mutu penduduk diharapkan salah satu tujuan pembangunan wilayah dapat tercapai. Pembangunan wilayah diukur kesuksesannya dengan membangun input yang ada. Dengan demikian salah satu indikator yang berpengaruh terhadap IKH antara lain angka melek huruf, angka kematian bayi, pendapatan daerah persentase penduduk miskin serta persentase balita kurang gizi. Apabila faktor – faktor tersebut dapat diminimalisir maka diharapkan IKH semakin tinggi dan akan berimplikasi terhadap pembangunan wilayah yang berkaitan erat dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Angka partisipasi murni di kabupaten Boyolali sebesar 8, 96 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di kabupaten Boyolali masih dalam taraf sedang. Namun demikian untuk mencapai tujuan pembangunan daerah perlu adanya upaya peningkatan mutu pendidikan serta tersedianya fasilitas layanan pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan sektor pendidikan maupun sektor kesehatan merupakan salah satu

upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat perlu adanya upaya konkret dari pemerintah daerah setempat dalam mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat sejahtera.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indeks kualitas hidup di kabupaten Boyolali tahun 2010 sebesar 158, 925. Berdasarkan klasifikasi IKH maka IKH di Kabupaten Boyolali tergolong tinggi. Maka semakin tinggi IKH maka semakin baik.
2. Dengan adanya indeks gini maka akan terlihat tingkat kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Di daerah kabupaten Boyolali dengan indeks gini sebesar 0,33 maka wilayah tersebut tergolong sedang. Dengan demikian kesenjangan antara pendapatan masyarakat satu dengan pendapatan masyarakat pasti tetap ada.
3. Kesenjangan pendapatan antar masyarakat dapat diminimalisir dengan cara peningkatan layanan fasilitas masyarakat di wilayah tersebut guna mencapai masyarakat yang sejahtera di kabupaten Boyolali.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.(2011) *Indeks Kualitas Hidup Manusia Anjlok*. Diperoleh pada 2 Juni 2013, dari <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/04/173364809/Indeks-Kualitas-Hidup-Manusia-Indonesia-Anjlok>
http://id.wikipedia.org/wiki/Koefisien_Gini
- Anonim. (2010). *Analisis Kesejahteraan Di Indonesia*. Diperoleh pada 2 Juni 2013, dari <http://k2xh.blogspot.com/2010/11/analisis-kesejahteraan-di-indonesia.html>
- Mantra, Bagoes Ida.(2006). *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset

Noviani, Rita. (2013). *Petunjuk Praktikum Metode dan Teknik I Analisis Sosial dan Ekonomi*. Surakarta : Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UNS.